



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEKADAU**

NOMOR : 503 / 27 /DPMPTSP-C / 2024

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TAPANG KUMAI NANGA ANSAR.**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SEKADAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tapang Kumai Nanga Ansar, diperlukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau Nomor 400.3.2/924.a/Dikbud.01 tanggal 22 Mei 2024, telah menyetujui diterbitkannya Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tapang Kumai Nanga Ansar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tapang Kumai Nanga Ansar dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 887);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 68 Tahun 2023 tentang Keddudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*;

2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
1. Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak – kanak (TK) kepada :
a. Nama Perkumpulan/
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tapang Kumai Nanga Anser.
b. NIB : 2902240091583
c. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
d. Nama Ketua : Eka Listra

e. Alamat (TK) : Dusun Muntik, Desa Nanga Ansar,
Kecamatan Belitang, Kabupaten
Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA

- : Pemegang izin Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tapang Kumai Nanga Ansar wajib:
- menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai asas, maksud, dan tujuan.
 - membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi anak, pembentukan anak, prilaku anak dan memberi rasa aman pada anak.
 - melaksanakan kegiatan sosial, dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
 - melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tapang Kumai Nanga Ansar secara berkala ke-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau.
 - mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tapang Kumai Nanga Ansar ini dapat dicabut / dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan persyaratan yang diajukan pemohon cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.

KEEMPAT

- : Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tapang Kumai Nanga Ansar ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KELIMA

- : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 07 Juni 2024.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEKADAU,


HANDAYANI, S.Si. Apt

Tembusan :

1. Bupati Sekadau
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau
3. Camat Belitang